



Evaluasi Implementasi Sekolah Ramah Anak Menggunakan *Pathway Comparison Model*

Ramdani Salam^{1*}, Putri Adibatur Rohmah², Pamuti³, Nasarudin⁴
FKIP, Universitas Khairun Ternate^{1*}
ramdani.salam@unkhair.ac.id

Article Info

Article history:

Received June, 26th 2023

Revised July, 15th 2023

Accepted August, 1st 2023

Keywords:

Implementasi
Sekolah Ramah Anak
Pathway Comparison
Model

ABSTRACT

This study evaluates the implementation of the Child Friendly School (CFS) program at SMPN 2 Kota Ternate, focusing on analyzing the components of CFS. It employs a qualitative descriptive approach using the Pathway Comparison Model by Kaufman (1990) for evaluation. Data collection techniques include in-depth interviews, observations, and the collection of documentary evidence. The evaluation results indicate that the school has implemented the CFS program with various efforts, such as creating a safe and inclusive learning environment and providing training on children's rights to the educational staff. However, there are several aspects that still require improvement, including the cleanliness of school facilities and the conditions of specific classrooms. Recommendations for improvement encompass strengthening training on children's rights, enhancing the cleanliness of school facilities, renovating classrooms and increasing monitoring and evaluation of the CFS program. The participation of students, parents, and alumni should continue to be promoted through organizations, social media, and regular meetings to support the CFS program.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. ©2023 by the author(s).



Corresponding Author:

Ramdani Salam
Universitas Khairun Ternate
ramdani.salam@unkhair.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki komitmen kuat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak, khususnya dalam bidang pendidikan dan perlindungan dari tindakan kekerasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan hak setiap individu untuk pendidikan dan pengembangan diri guna meningkatkan kualitas hidup. Sejalan dengan hal tersebut, pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan juga mengenai hak anak-anak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan bahwa hingga Februari 2019, terdapat sekitar 501.623 satuan pendidikan di Indonesia yang mencakup semua tingkatan, termasuk pendidikan dasar, menengah, pra sekolah, dan pendidikan luar biasa. Angka ini mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan akses pendidikan kepada seluruh warga negara, termasuk anak-anak, sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dan memastikan pemenuhan hak pendidikan mereka (Deputi Tumbuh Kembang Anak, 2020).

Di lain sisi, sekolah menghadapi tantangan serius dengan fenomena kekerasan (*bullying*) yang melibatkan guru dan siswa. Hal ini tentunya telah merusak citra pendidikan dan memicu pertanyaan kritis tentang esensi pendidikan. Studi di tiga kota besar; Jakarta, Surabaya, dan Makassar menunjukkan tingkat kekerasan fisik dan psikologis yang signifikan, terutama pada tingkat SMA dan SMP. Sehingga perlu tindakan untuk mencegah dan mengatasi kekerasan di lingkungan pendidikan agar sekolah tetap menjadi tempat positif bagi siswa (E. D. Putri, 2022). Berdasarkan data dari KPAI menyatakan bahwa kasus perundungan mengalami peningkatan: 122 kasus (2016), 129 kasus (2017), 107 kasus (2018), dan 132 kasus (2019-2020)(Pahlevi, 2022).

Usaha perlindungan anak di berbagai tempat, termasuk di satuan pendidikan, memerlukan keseriusan oleh berbagai sektor. Pemerintah telah menghadirkan kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA) untuk memastikan pengembangan minat, bakat, dan keterampilan anak, serta persiapan mereka dalam kehidupan yang bertanggung jawab dan damai. Dalam konteks pendidikan, terutama untuk mengatasi permasalahan *bullying*, kepala sekolah dapat menerbitkan tata tertib yang mencakup prinsip 3P: Provisi (memberikan kebutuhan peserta didik), Proteksi (menyediakan perlindungan dari bahaya dan *bullying*), dan Partisipasi (memberikan kebebasan berekspresi untuk pengembangan minat dan bakat). Dengan demikian, diharapkan sekolah menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan optimal anak (Nur Hayati & Handayani, 2021). Partisipasi anak meliputi: mengkomunikasikan program sekolah dengan melibatkan anak (Yosada, 2019).

Dalam rangka mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak, Walikota Ternate telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Sebelum adanya Perda Kota Layak Anak (KLA) di Kota Ternate, program yang serupa melalui Sekolah Ramah Anak (SRA) juga sudah diterapkan di instansi pendidikan. Pada tahun 2021, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) Maluku Utara melaporkan terdapat 292 kasus kekerasan anak dan perempuan. Pada bulan Januari-Maret 2022, tercatat 64 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Maluku Utara. Kekerasan di sekolah, baik yang dilakukan oleh sesama siswa maupun oleh guru, dianggap sebagai salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan (Wati et al., 2021). Selain itu, melalui Komisi III DPRD Kota Ternate, Dinas Pendidikan dinilai tidak mampu menangani berbagai masalah dalam satuan pendidikan, termasuk aksi protes dari siswa dan guru, serta masalah internal seperti pungli, konflik antara guru dan murid, dan perundungan antar siswa. Akibatnya, kualitas pendidikan di Kota Ternate turun dari peringkat 3 besar menjadi 5 besar dari 10 Kabupaten/Kota di Maluku Utara (Dedi Sero Sero, 2022).

Peningkatan kualitas pendidikan hanya dapat dicapai dengan memperbaiki semua aspek pendidikan, termasuk pengembangan metode pendidikan yang bersifat ramah anak. Konsep SRA adalah usaha untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, bersih, peduli, dan berbudaya, yang juga melindungi hak-hak dan memberikan perlindungan anak dari diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan menyimpang. Tujuan dari SRA adalah membuat sekolah menjadi tempat yang nyaman bagi anak-anak sambil memastikan bahwa hak-hak mereka terpenuhi dan mereka dilindungi (KemenPPPA, 2015). Peraturan Daerah Nomor 1, Pasal 1 ayat 13 juga menggambarkan bahwa SRA dapat diterapkan di satuan pendidikan formal maupun non formal. Namun, evaluasi terhadap implementasi program SRA di Kota Ternate menjadi penting karena prinsip-prinsip program ini belum berjalan dengan baik, sehingga kualitas pendidikan di kota tersebut menurun.

Beberapa masalah dalam implementasi program SRA disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kurang memadai, misalnya: anggaran sekolah yang terbatas, jumlah guru dan aktivitas guru yang mengakibatkan program SRA berjalan tidak maksimal (Rangkuti, 2019). Beberapa permasalahan yang ditemukan di Ternate adalah: penurunan kualitas pendidikan di Kota Ternate, termasuk kurangnya pertimbangan terhadap kompetensi dan kualifikasi saat mengganti kepala sekolah di tingkat SD-SMP, serta masalah kekerasan di antara warga sekolah yang sering muncul di media massa (Dedi Sero Sero, 2022).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program SRA di salah satu sekolah di Kota Ternate, khususnya di jenjang Sekolah Menengah Pertama. Hal ini dilaksanakan guna mengetahui sejauh mana program ini sudah diimplementasikan. Model evaluasi menggunakan *Pathway Comparison Model* yaitu sebuah kerangka evaluasi yang digunakan untuk membandingkan berbagai jalur atau proses yang berbeda dalam sebuah sistem atau konteks tertentu. Model ini membantu mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara berbagai jalur tersebut, serta memberikan dasar untuk mengevaluasi keefektifan, efisiensi, atau dampak dari masing-masing jalur tersebut (Wulandari, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di SMPN 2 Kota Ternate. Populasi penelitian ini adalah seluruh Warga SMPN 2 Kota Ternate, sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Waka kesiswaan, Wali kelas 1,2, dan 3, dan beberapa siswa dari kelas 3. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melalui wawancara mendalam, observasi dan pengumpulan bukti dokumentasi. Penelitian ini memanfaatkan metode triangulasi sumber untuk menguji validitas data. Metode triangulasi sumber adalah teknik di mana informasi diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda dalam hal waktu, individu, dan alat, dan kemudian data tersebut dianalisis dan disusun kembali untuk memastikan keakuratan dan kredibilitasnya. (Lexy J. Moleong, 2007). Kemudian untuk analisis data, peneliti mereduksi data, menyajikan data dan mengambil kesimpulan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai implementasi program SRA di SMPN 2 Kota Ternate menggunakan evaluasi *Pathway Comparison Model* dengan fokus menganalisis implementasi komponen-komponen SRA yang terdiri dari: kebijakan, komponen penyelenggaraan dan pelatihan. *Pertama*, kebijakan SRA sudah ada dalam bentuk surat keputusan yang mengatur implementasi program di lingkungan sekolah. Hal ini menjelaskan bahwa program SRA yang telah digulirkan di SMPN 2 Ternate secara jelas telah membawa misi yang tegas. Program SRA bertujuan untuk memberantas masalah *bullying* yang merajalela di lingkungan sekolah dan menjadi tantangan serius yang menghantui kesejahteraan fisik dan emosional siswa.

Tujuan program SRA tidak sekadar menghilangkan gejala, tapi juga memastikan pemenuhan hak-hak anak, yang melibatkan hak mereka untuk merasa aman dan nyaman dalam proses pendidikan. Program SRA memiliki tiga prinsip kunci. *Pertama*, program ini berfokus pada kepentingan dan keamanan anak-anak, sehingga keputusan pendidikan didasarkan pada kebutuhan dan keamanan mereka. Anak-anak dilihat sebagai individu yang aktif yang memerlukan lingkungan belajar yang sehat dan aman. *Kedua*, program ini mempromosikan partisipasi demokratis dimana anak-anak dan orang tua terlibat dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. *Ketiga*, prinsip inklusivitas yang berarti bahwa semua anak memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa memandang perbedaan.

Sasaran implementasi program ini adalah seluruh siswa di SMPN 2 Kota Ternate. Program ini dirancang untuk mengubah sikap siswa yang bukan sekadar penanganan permasalahan isolatif, melainkan langkah progresif untuk menciptakan perubahan yang merata di seluruh sekolah. Program SRA pada dasarnya adalah inisiatif untuk memberikan hak penuh kepada anak-anak dan mengelola kelas serta sekolah dengan fokus pada anak-anak. Program ini juga menjadi indikator dari inisiatif yang lebih luas, seperti Program Kota/Kabupaten Ramah Anak dan Desa Ramah Anak yang diinisiasi oleh pemerintah. Secara ringkas, program SRA ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu provisi (penyediaan), proteksi (perlindungan), dan partisipasi. Program SRA harus mempertimbangkan bahwa lingkungan sekolah harus bersih, sehat, aman, peduli, toleran, dan bebas dari perilaku diskriminasi dan *bullying*.

Kedua, SMPN 2 Ternate telah menggunakan sumber pembelajaran yang relevan dan memberikan kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi yang sesuai dengan program SRA. Melalui rapat Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), guru-guru berbagi metode dan bahan ajar yang efektif. Pemanfaatan lahan sekolah untuk media pembelajaran dengan penyelenggaraan biopori dan lahan hidrdroponik dan peniadaan tanaman berduri di lingkungan sekolah. Selain itu, setiap kelas memiliki pojok baca mini yang membantu memperkaya pemahaman siswa dan meningkatkan minat baca serta literasi mereka. Semua ini adalah upaya penting dalam menciptakan pengalaman belajar yang mendukung perkembangan holistik siswa di sekolah.

Dalam upaya untuk memastikan kesehatan dan keamanan siswa di SMPN 2, pejabat sekolah mengeluarkan seruan kepada para penjual makanan di sekitar sekolah agar tidak menggunakan plastik dan tusuk sate dalam hidangan mereka. Sayangnya, seruan ini tidak dihiraukan yang berdampak kepada kesehatan siswa. Solusi yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah menutup kantin yang tidak mematuhi himbauan. Pihak sekolah kemudian mendukung pendirian koperasi UMKM yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan memberikan syarat khusus bagi penjual makanan, seperti larangan penggunaan bungkus mika. Selain itu, sekolah juga meningkatkan upaya kebersihan dan keamanan dengan *cleaning service* dan petugas penjaga untuk memastikan siswa mendapatkan makanan yang aman dan sehat.

Berdasarkan hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa SMPN 2 Kota Ternate telah memenuhi dasar-dasar fasilitas sekolah yang seharusnya dimiliki, termasuk fasilitas gedung sekolah, ruang kelas, fasilitas olahraga (lapangan basket dan sanggar tari), lab komputer dan lab praktik IPA, ruang perpustakaan, UKS, koperasi, dan jalan akses khusus disabilitas (sekolah inklusif). Meskipun demikian, dalam proses observasi, ditemukan beberapa aspek yang perlu perhatian lebih lanjut. *Pertama*, kebersihan ruang toilet yang belum sesuai dengan standar yang diharapkan perlu mendapat perhatian dari pihak sekolah. *Kedua*, sejumlah ruang kelas memerlukan renovasi, terutama pada atapnya dan *ketiga*, penataan gardu listrik ulang di sekolah juga perlu dipertimbangkan untuk menghindari potensi bahaya dalam aktivitas anak-anak. Hasil evaluasi ini juga dilakukan di daerah lain seperti di Tenggarong yang mengevaluasi Sekolah Ramah Anak telah melibatkan seluruh

komunitas sekolah (Inniyah, 2021). Sementara itu, sarana dan prasarana didukung oleh alokasi anggaran sekolah yang tercantum dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah.

		
<p>Kegiatan Ekstrakurikuler sebagai media pengembangan bakat siswa</p>	<p>Pojok baca kelas sebagai upaya meningkatkan minat literasi siswa</p>	<p>Koperasi Andalan sebagai upaya sekolah dalam memberikan makanan berkualitas bagi siswa</p>
		
<p>Pantauan keamanan melalui CCTV</p>	<p>Jalur akses disabilitas sebagai upaya mendukung sekolah inklusif</p>	<p>Projek biopori sebagai media pembelajaran</p>

Gambar 1. Kegiatan dan Fasilitas yang mendukung Program SRA di SMPN 2 Ternate.

Ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan telah menerima pelatihan mengenai hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pendidik dan tenaga didik sudah memenuhi standar pelaksanaan SRA, namun masih ada beberapa kasus *bullying* yang menunjukkan bahwa beberapa staf pendidik mungkin perlu lebih ramah. Program ini juga melibatkan pelaksanaan proses belajar yang ramah anak, termasuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa SMPN 2 Kota Ternate telah memberikan pelatihan kepada guru-guru, meskipun belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Terakhir, dalam upaya untuk melibatkan anak-anak dan pemangku kepentingan dalam mendukung dan mengawasi implementasi SRA, SMPN 2 memberikan peluang kepada siswa untuk berpartisipasi dalam menyampaikan pandangan mereka melalui keanggotaan dalam organisasi. Siswa juga dimotivasi untuk turut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Sementara itu, untuk menggandeng partisipasi wali murid dan alumni, SMPN 2 memanfaatkan media sosial sebagai platform untuk memfasilitasi diskusi. Sekolah juga secara rutin menyelenggarakan pertemuan dengan wali murid dan alumni guna mengumpulkan pandangan serta solusi terkait dengan tantangan dan kebutuhan yang mendukung kelangsungan kegiatan belajar mengajar di SMPN 2 Kota Ternate. Partisipasi *stakeholder* dalam implementasi program SRA sangat diperlukan. Apabila terdapat *stakeholder* yang kurang aktif dalam menggiring pelaksanaan program akan menghambat proses untuk mencapai tujuan implempementasi (A. Putri & Akmal, 2019).

KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang implementasi program sarana dan prasarana SRA di SMPN 2 Kota Ternate mengungkapkan komitmen kuat sekolah dalam mengatasi masalah *bullying* dan menciptakan lingkungan belajar yang aman. Sekolah ini telah menyediakan fasilitas yang relevan, seperti ruang kelas dan fasilitas olahraga. Pendidik telah dilatih mengenai hak-hak anak, meskipun tantangan pelaksanaan masih ada. Partisipasi siswa, wali murid, dan alumni diperhatikan melalui organisasi, media sosial, dan pertemuan rutin. Semua upaya ini menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, inklusif, dan peduli terhadap anak-anak. Berdasarkan dari hasil evaluasi tersebut, beberapa rekomendasi diberikan sehingga bisa dijadikan bahan untuk pengambilan keputusan untuk keberlangsungan program SRA, yaitu: a) perlu penguatan pelaksanaan pelatihan mengenai hak-hak anak untuk memastikan konsistensi dalam pelaksanaan, b) memprioritaskan perbaikan kebersihan fasilitas sekolah, khususnya toilet. c) renovasi ruang kelas yang memerlukan perbaikan, terutama pada bagian atap. d) memperkuat komunikasi dengan wali murid dan alumni melalui media sosial dan pertemuan rutin. e) meningkatkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program SRA dan f) mempromosikan nilai-nilai SRA dalam seluruh aspek kehidupan sekolah untuk menciptakan budaya peduli terhadap anak-anak.

ACKNOWLEDGEMENT

Terima kasih kami sampaikan atas segala dukungan dari Universitas Khairun Ternate, Panitia PKUPT FKIP, SMPN 2 Kota Ternate dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Dedi Sero Sero. (2022). *Komisi III DPRD Kota Ternate Desak Disdik Segera Selesaikan Masalah Tanah Sekolah*. <https://Indotimur.Com/Pendidikan/Komisi-Iii-Dprd-Kota-Ternate-Desak-Disdik-Segera-Selesaikan-Masalah-Tanah-Sekolah>
- Deputi Tumbuh Kembang Anak. (2020). *Panduan Sekolah Ramah Anak* (Deputi Tumbuh Kembang Anak (Ed.)). Deputi Tumbuh Kembang Anak.
- Inniyah, S., & Mulawarman, W. G. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Program Sekolah Ramah Anak pada SMP Negeri 2 Tenggara dengan Model Evaluasi CIPP. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan (JIMPIAN)*, 1(2), 39-54.
- Kemenpppa. (2015). *Panduan Sekolah Ramah Anak* (p. 41). Deputi Tumbuh Kembang Anak.
- Lexy J. Moleong. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- Nur Hayati, D., & Handayani, D. (2021). Menciptakan Kesadaran Santri Terhadap Lingkungan Melalui Gerakan Go Green Pondok Pesantren Assa'Idiyah. *Jamu : Jurnal Abdi Masyarakat Umus*, 2(01), 27–32. <https://Doi.Org/10.46772/Jamu.v1i02.529>
- Pahlevi, R. (2022, July 29). *Berapa Banyak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah Indonesia?* Databoks.
- Rangkuti, S. R., & Maksum, I. R. (2019). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Ramah Anak Di SMP Negeri 6 Depok. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 4(1), 8-19.
- Putri, A., & Akmal, A. (2019). Sekolah Ramah Anak: Tantangan dan Implikasinya Terhadap Pemenuhan Hak Anak. *Journal of Civic Education*, 2(3), 228-235.
- Putri, E. D. (2022). Kasus

Ramdani Salam, Putri Adibatur Rohmah, Pamuti, Nasarudin- Evaluasi. *Implementasi Sekolah Ramah Anak menggunakan Pathway Comparison Model*

Bullying Di Lingkungan Sekolah : Dampak Serta Penanganannya. *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran Dan Pengabdian, 10*.

Wati, E. K., Suyatno, S., & Widodo, W. (2021). Strategi Penerapan Program Sekolah Ramah Anak Di Sd Negeri Kasihan Bantul. *Pembelajar: Jurnal Ilmu Pendidikan, Keguruan, Dan Pembelajaran, 5*(1). <https://doi.org/10.26858/Pembelajar.v5i1.15681>

Wulandari, T. (2020). Tesis: *Evaluasi Penyelenggaraan Program Sekolah Ramah Anak (Sra)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Yosada, K. R., & Kurniati, A. (2019). Menciptakan sekolah ramah anak. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa: Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar, 5*(2), 145-154.